

**DAMPAK BANTUAN PEMERINTAH DAN PAJAK DAERAH  
TERHADAP PENDAPATAN IKM KONVENSIONAL TENUN DI KOTA  
LARANTUKA, PROVINSI NTT**

**Melkior Keleka Hayon**

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

[hayonmelkior@gmail.com](mailto:hayonmelkior@gmail.com)

**Joko Priyono**

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

[jokopriyono@untag-sby.ac.id](mailto:jokopriyono@untag-sby.ac.id)

**ABSTRACT**

This study aims to examine the effect of Government Assistance and Regional Taxes on the Income of Conventional Weaving SMEs in Larantuka City. The study employed a quantitative method with an explanatory approach by distributing questionnaires to 40 conventional weaving SME owners. Data were analyzed using multiple linear regression with the assistance of SPSS software. The results indicate that Government Assistance and Regional Taxes simultaneously have a significant effect on the income of conventional weaving SMEs. Partially, Government Assistance has a positive and significant effect on SME income, while Regional Taxes have a positive but insignificant effect. The coefficient of determination ( $R^2$ ) value of 0.476 indicates that 47.6% of the variation in the income of conventional weaving SMEs can be explained by these two variables, while the remaining 52.4% is influenced by other factors outside the study. These findings suggest that government assistance plays an important role in increasing the income of weaving artisans through capital support, training, mentoring, and marketing assistance. Therefore, optimizing government assistance programs is essential to support the sustainability and development of conventional weaving SMEs in Larantuka City.

**Keywords:** *Government Assistance, Regional Taxes, Income, Conventional Weaving SMEs.*

**A. PENDAHULUAN**

Industri Kecil dan Menengah (IKM) memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu sektor IKM yang berkembang di Kabupaten Flores Timur adalah industri tenun tradisional yang tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga memiliki nilai budaya sebagai warisan masyarakat Lamaholot. Bagi sebagian masyarakat di Kota Larantuka, usaha tenun menjadi sumber pendapatan utama yang membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Namun demikian, pelaku IKM konvensional tenun masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan modal usaha, rendahnya kapasitas produksi, penggunaan teknologi yang masih sederhana, serta akses pemasaran yang belum optimal. Kondisi tersebut berdampak pada kemampuan pengrajin dalam meningkatkan produktivitas dan pendapatan usahanya secara berkelanjutan.

Untuk mendukung perkembangan IKM tenun, pemerintah telah melaksanakan berbagai program bantuan yang meliputi bantuan modal usaha, bantuan alat dan sarana produksi, pelatihan, pendampingan usaha, serta promosi produk. Bantuan pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kapasitas produksi, kualitas produk, dan daya saing usaha sehingga dapat mendorong peningkatan pendapatan pengrajin tenun. Selain bantuan pemerintah, faktor lain yang turut memengaruhi kondisi usaha adalah pajak daerah. Pajak daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik, namun bagi pelaku usaha kecil pajak juga dapat dipandang sebagai beban biaya yang berpotensi memengaruhi pendapatan usaha. Oleh karena itu, bantuan pemerintah dan pajak daerah menjadi dua instrumen kebijakan yang memiliki keterkaitan dengan keberlangsungan dan perkembangan IKM konvensional tenun.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa bantuan pemerintah cenderung memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan usaha kecil, sedangkan pengaruh pajak daerah terhadap kinerja usaha masih menunjukkan hasil yang beragam. Perbedaan temuan tersebut menunjukkan bahwa pengaruh kedua variabel tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut, khususnya pada IKM konvensional tenun yang memiliki karakteristik usaha berbeda dengan UMKM pada umumnya. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dampak bantuan pemerintah dan pajak daerah terhadap pendapatan IKM konvensional tenun di Kota Larantuka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan pendapatan dan keberlanjutan usaha tenun tradisional.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

Pendapatan merupakan salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu usaha dalam menjalankan aktivitas ekonominya. Dalam perspektif ekonomi, pendapatan usaha merupakan selisih antara total penerimaan yang diperoleh dengan seluruh biaya yang dikeluarkan selama proses produksi dan operasional usaha. Pada IKM konvensional tenun, pendapatan tidak hanya ditentukan oleh jumlah produk yang berhasil dijual, tetapi juga dipengaruhi oleh efisiensi biaya produksi, keberlangsungan usaha, serta kemampuan usaha dalam menyerap tenaga kerja. Semakin tinggi tingkat produksi dan penjualan yang dihasilkan, maka semakin besar pula peluang pelaku usaha memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pendapatan menjadi indikator yang penting dalam menilai perkembangan dan keberlanjutan IKM konvensional tenun.

Bantuan pemerintah merupakan salah satu bentuk intervensi kebijakan yang bertujuan meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat dan pelaku usaha. Bantuan pemerintah dapat diberikan dalam bentuk modal usaha, bantuan alat dan sarana produksi, pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, serta fasilitasi pemasaran produk. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015, bantuan pemerintah merupakan bantuan yang diberikan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, maupun lembaga dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa untuk mendukung pencapaian tujuan tertentu. Dalam konteks IKM tenun, bantuan

pemerintah berperan penting dalam mengatasi keterbatasan modal, meningkatkan produktivitas, memperbaiki kualitas produk, serta memperluas akses pasar. Dengan adanya dukungan tersebut, pelaku usaha memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan kapasitas produksi dan pendapatan usahanya.

Selain bantuan pemerintah, faktor lain yang diduga memengaruhi pendapatan IKM adalah pajak daerah. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan kepada pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pembangunan serta pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bagi pelaku usaha kecil, pajak daerah dapat dipandang sebagai tambahan biaya yang memengaruhi pendapatan bersih usaha. Namun di sisi lain, pajak daerah juga dapat memberikan manfaat tidak langsung melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan fasilitas publik, dan terciptanya iklim usaha yang lebih kondusif. Oleh karena itu, pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan usaha dapat bersifat langsung maupun tidak langsung tergantung pada kondisi usaha dan lingkungan ekonomi yang ada.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa bantuan pemerintah dan pajak daerah memiliki hubungan dengan perkembangan usaha kecil dan menengah. Penelitian Jati dan Bala (2019) menunjukkan bahwa program pemberdayaan pemerintah pada pengrajin tenun ikat Lamaholot mampu meningkatkan jumlah usaha, penyerapan tenaga kerja, dan pendapatan pengrajin. Penelitian Karmeli et al. (2022) juga menemukan bahwa bantuan pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan pelaku UMKM. Sementara itu, penelitian Wulandari et al. (2024) serta Amelia dan Sicillia (2025) menunjukkan bahwa variabel perpajakan memiliki pengaruh yang positif tetapi tidak signifikan terhadap kondisi UMKM. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa bantuan pemerintah cenderung menjadi faktor yang lebih dominan dalam meningkatkan pendapatan usaha dibandingkan pajak daerah.

Meskipun demikian, hasil penelitian sebelumnya masih menunjukkan perbedaan berdasarkan karakteristik objek dan lokasi penelitian. Sebagian besar penelitian dilakukan pada UMKM secara umum, sedangkan penelitian mengenai IKM konvensional tenun, khususnya di Kota Larantuka, masih relatif terbatas. Selain itu, belum banyak penelitian yang menguji secara simultan pengaruh bantuan pemerintah dan pajak daerah terhadap pendapatan IKM konvensional tenun. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan penelitian tersebut dengan menganalisis dampak bantuan pemerintah dan pajak daerah terhadap pendapatan IKM konvensional tenun di Kota Larantuka, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

### **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linear berganda. Pendapatan IKM konvensional tenun digunakan sebagai variabel terikat (Y), bantuan pemerintah sebagai variabel bebas pertama ( $X_1$ ), dan pajak daerah sebagai variabel bebas kedua ( $X_2$ ). Penelitian dilaksanakan pada pelaku IKM konvensional tenun di Desa Daniwato, Kecamatan Solor Barat,

Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Populasi penelitian adalah seluruh pelaku IKM konvensional tenun yang menjalankan usaha tenun tradisional di lokasi penelitian. Sampel penelitian berjumlah 40 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria: (1) pelaku usaha tenun yang masih aktif memproduksi, (2) memiliki pengalaman usaha minimal satu tahun, dan (3) terlibat dalam aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan kebijakan perpajakan daerah.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada pelaku IKM konvensional tenun yang disusun berdasarkan indikator variabel penelitian. Variabel bantuan pemerintah diukur melalui indikator bantuan modal usaha, bantuan alat dan sarana produksi, pelatihan dan pendampingan usaha, serta bantuan pemasaran atau promosi produk. Variabel pajak daerah diukur melalui indikator besaran tarif pajak, kemudahan administrasi perpajakan, kepatuhan pembayaran pajak, dan persepsi pelaku usaha terhadap kebijakan pajak daerah. Sementara itu, variabel pendapatan IKM konvensional tenun diukur melalui tingkat produksi usaha, pendapatan usaha, keberlangsungan usaha, dan penyerapan tenaga kerja. Data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), jurnal ilmiah, buku, dokumen pemerintah, serta berbagai referensi yang relevan dengan penelitian.

Pengujian hipotesis dilakukan melalui beberapa tahapan analisis, yaitu uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas, kemudian dilanjutkan dengan analisis regresi linear berganda. Pengujian hipotesis menggunakan Uji t untuk mengetahui pengaruh parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, Uji F untuk mengetahui pengaruh simultan variabel independen terhadap variabel dependen, serta Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) untuk mengetahui besarnya kemampuan variabel bantuan pemerintah dan pajak daerah dalam menjelaskan variasi pendapatan IKM konvensional tenun. Seluruh data diolah menggunakan perangkat lunak SPSS versi 26.

Persamaan regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y : Pendapatan IKM Konvensional Tenun

X<sub>1</sub> : Bantuan Pemerintah

X<sub>2</sub> : Pajak Daerah

$\alpha$  : Konstanta

$\beta_1, \beta_2$  : Koefisien Regresi

$\varepsilon$  : Error

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Hasil Penelitian**

Uji regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan besarnya pengaruh variabel bantuan pemerintah dan pajak daerah terhadap pendapatan IKM

konvensional tenun di Kota Larantuka. Analisis ini juga digunakan untuk mengetahui apakah hubungan yang terjadi bersifat positif atau negatif serta untuk memprediksi perubahan pendapatan IKM apabila terjadi perubahan pada variabel bantuan pemerintah dan pajak daerah.

Persamaan umum regresi linier berganda yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Keterangan:

$Y$  = Pendapatan IKM Konvensional Tenun

$a$  = Konstanta

$b$  = Koefisien regresi

$X_1$  = Bantuan Pemerintah

$X_2$  = Pajak Daerah

**Tabel 1. 1 Regresi Linier Berganda**

|   | Model             | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | T     | Sig.  |
|---|-------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|-------|
|   |                   | B                           | Std. Error | Beta                      |       |       |
| 1 | (Constant)        | 9.649                       | 4.033      |                           | 2.393 | .022  |
|   | Bantuan Pemerinta | .619                        | .140       | .630                      | 4.434 | <.001 |
|   | Pajak Daera       | .097                        | .138       | .100                      | .704  | .486  |

Sumber: Data Primer, data diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 1.1, Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = 9,649 + 0,619X_1 + 0,097X_2 + e$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 9,649 mengindikasikan bahwa apabila variabel Bantuan Pemerintah ( $X_1$ ) dan Pajak Daerah ( $X_2$ ) dianggap tetap atau bernilai nol, maka Pendapatan IKM Konvensional Tenun ( $Y$ ) sebesar 9,649.

Koefisien regresi Bantuan Pemerintah ( $X_1$ ) sebesar 0,619 menunjukkan hubungan positif terhadap pendapatan IKM konvensional tenun. Artinya, setiap peningkatan bantuan pemerintah sebesar satu satuan akan meningkatkan pendapatan IKM sebesar 0,619 dengan asumsi variabel lain tetap. Hasil ini menunjukkan bahwa bantuan pemerintah memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan pelaku usaha tenun.

Koefisien regresi Pajak Daerah ( $X_2$ ) sebesar 0,097 juga menunjukkan hubungan positif terhadap pendapatan IKM konvensional tenun. Artinya, setiap peningkatan satu satuan pada pajak daerah akan meningkatkan pendapatan IKM sebesar 0,097 dengan asumsi variabel lain konstan. Namun, pengaruh pajak daerah relatif lebih kecil dibandingkan bantuan pemerintah, sehingga bantuan pemerintah

menjadi variabel yang lebih dominan dalam memengaruhi pendapatan IKM konvensional tenun.

### **Pengujian Hipotesis**

#### **Uji F (Uji Simultan)**

Dalam penelitian ini, Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen, yaitu Bantuan Pemerintah ( $X_1$ ) dan Pajak Daerah ( $X_2$ ), secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu Pendapatan IKM Konvensional Tenun ( $Y$ ) di Kota Larantuka. Kriteria pengambilan keputusan adalah

- Hipotesis diterima apabila nilai F-hitung lebih besar dari F-tabel ( $F_{hitung} > F_{tabel}$ ) atau nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ( $Sig. < 0,05$ ).
- Sebaliknya, hipotesis ditolak apabila nilai F-hitung lebih kecil dari F-tabel ( $F_{hitung} < F_{tabel}$ ) atau nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ( $Sig. > 0,05$ ).

**Tabel 1. 2 Hasil Uji F**

| Model |            | Sum of Squares | Df | Mean Square | F      | Sig.               |
|-------|------------|----------------|----|-------------|--------|--------------------|
| 1     | Regression | 284.559        | 2  | 142.280     | 16.807 | <,001 <sup>b</sup> |
|       | Residual   | 313.216        | 37 | 8.465       |        |                    |
|       | Total      | 597.775        | 39 |             |        |                    |

Sumber: Data Primer, data diolah (2026)

Berdasarkan hasil uji F pada Tabel 1.2, diperoleh nilai F hitung sebesar 16,807 dengan nilai signifikansi  $< 0,001$ , yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Bantuan Pemerintah ( $X_1$ ) dan Pajak Daerah ( $X_2$ ) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan IKM Konvensional Tenun ( $Y$ ) di Kota Larantuka. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh kedua variabel secara bersama-sama terhadap pendapatan IKM diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa bantuan pemerintah dan kebijakan pajak daerah memiliki peran dalam memengaruhi pendapatan pelaku IKM konvensional tenun.

#### **Uji T (Uji Parsial)**

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Kriteria pengambilan keputusan dalam uji t adalah jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima, sedangkan jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak.

**Tabel 1.3 Hasil Uji T**

| Model |                    | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | T     | Sig.  |
|-------|--------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|-------|
|       |                    | B                           | Std. Error | Beta                      |       |       |
| 1     | (Constant)         | 9.649                       | 4.033      |                           | 2.393 | .022  |
|       | Bantuan Pemerintah | .619                        | .140       | .630                      | 4.434 | <,001 |
|       | Pajak Daerah       | .097                        | .138       | .100                      | .704  | .486  |

Sumber: Data Primer, data diolah (2026)

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 1.3, variabel Bantuan Pemerintah ( $X_1$ )

memperoleh nilai  $t$  hitung sebesar 4,434 dengan nilai signifikansi  $< 0,001$ , yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Bantuan Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan IKM Konvensional Tenun di Kota Larantuka. Dengan demikian, semakin besar bantuan yang diberikan pemerintah, baik berupa modal, pelatihan, pendampingan, maupun dukungan pemasaran, maka semakin meningkat pendapatan pelaku IKM tenun.

Sementara itu, variabel Pajak Daerah ( $X_2$ ) memperoleh nilai  $t$  hitung sebesar 0,704 dengan nilai signifikansi 0,486, yang lebih besar dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan IKM Konvensional Tenun di Kota Larantuka. Meskipun memiliki arah hubungan positif, pengaruhnya relatif lemah sehingga perubahan pendapatan IKM lebih banyak dipengaruhi oleh faktor lain, terutama bantuan pemerintah, produksi, dan pemasaran usaha.

#### **Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur kemampuan variabel Bantuan Pemerintah ( $X_1$ ) dan Pajak Daerah ( $X_2$ ) dalam menjelaskan variasi Pendapatan IKM Konvensional Tenun ( $Y$ ). Nilai  $R^2$  berada pada rentang 0 sampai 1, di mana semakin besar nilai  $R^2$ , semakin besar pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan perubahan pada variabel dependen. Dengan demikian, koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar kontribusi Bantuan Pemerintah dan Pajak Daerah terhadap Pendapatan IKM Konvensional Tenun.

**Tabel 1. 4 Hasil Uji Koefisien Determinasi**

| Model | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1     | .690 <sup>a</sup> | .476     | .448              | 2.90952                    |

*Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2026*

Berdasarkan Tabel 1.4 diketahui bahwa nilai R Square ( $R^2$ ) sebesar 0,476. Hal ini menunjukkan dampak variabel bebas Bantuan Pemerintah dan Pajak Daerah terhadap Pendapatan IKM Konvensional Tenun sebesar 47,6%, Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Bantuan Pemerintah dan Pajak Daerah memiliki kemampuan yang cukup baik dalam menjelaskan perubahan Pendapatan IKM Konvensional Tenun di Kota Larantuka, Provinsi Nusa Tenggara Timur

#### **Pembahasan**

##### **Bantuan Pemerintah Terhadap Pendapatan Ikm Konvensional Tenun**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bantuan Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan IKM Konvensional Tenun di Kota Larantuka, yang ditunjukkan oleh nilai  $t$  hitung sebesar 4,434 dengan tingkat signifikansi  $< 0,001$ . Hasil ini menunjukkan bahwa semakin besar bantuan yang diberikan pemerintah, maka semakin tinggi pula pendapatan yang diperoleh pelaku IKM tenun.

Bantuan pemerintah berupa modal usaha, sarana produksi, pelatihan, pendampingan, dan dukungan pemasaran mampu meningkatkan produktivitas, kualitas produk, serta akses pasar para pengrajin tenun. Kondisi tersebut berdampak pada peningkatan pendapatan usaha.

Temuan ini sejalan dengan teori ekonomi publik yang menekankan peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan usaha. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Jati dan Bala (2020) yang menyatakan bahwa program bantuan pemerintah mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan pengrajin tenun. Dengan demikian, bantuan pemerintah menjadi faktor penting dalam mendukung keberlanjutan usaha dan peningkatan pendapatan IKM konvensional tenun di Kota Larantuka.

#### **Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Ikm Konvensional Tenun**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Pendapatan IKM Konvensional Tenun di Kota Larantuka, dengan nilai  $t$  hitung sebesar 0,704 dan tingkat signifikansi 0,486 ( $> 0,05$ ). Hasil ini menunjukkan bahwa pajak daerah belum menjadi faktor utama yang memengaruhi perubahan pendapatan pelaku IKM tenun.

Tidak signifikannya pengaruh pajak daerah disebabkan karena sebagian besar usaha tenun masih berskala kecil sehingga beban pajak yang ditanggung relatif rendah. Selain itu, pendapatan pengrajin lebih banyak dipengaruhi oleh faktor lain seperti modal usaha, kapasitas produksi, pemasaran, dan dukungan pemerintah. Oleh karena itu, meskipun pajak daerah memiliki hubungan positif dengan pendapatan usaha, pengaruhnya belum cukup kuat secara statistik. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan IKM konvensional tenun lebih ditentukan oleh faktor produktivitas dan pemberdayaan usaha dibandingkan aspek perpajakan daerah.

#### **Bantuan Pemerintah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Ikm Konvensional Tenun**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bantuan Pemerintah dan Pajak Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan IKM Konvensional Tenun di Kota Larantuka, yang ditunjukkan oleh nilai  $F$  hitung sebesar 16,807 dengan tingkat signifikansi  $< 0,001$ . Selain itu, nilai  $R$  Square sebesar 0,476 menunjukkan bahwa kedua variabel mampu menjelaskan 47,6% variasi pendapatan IKM konvensional tenun, sedangkan 52,4% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian.

Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan IKM tenun, terutama melalui program bantuan yang mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan pengrajin. Sementara itu, pajak daerah turut berkontribusi meskipun pengaruhnya tidak signifikan secara parsial. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus memperkuat program pemberdayaan, pelatihan, pendampingan, dan promosi produk tenun guna meningkatkan pendapatan serta keberlanjutan usaha tenun di Kota Larantuka.

### **E. PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh bantuan pemerintah dan pajak daerah terhadap pendapatan IKM konvensional tenun di Kota Larantuka, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel bantuan pemerintah dan pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan IKM konvensional tenun di Kota Larantuka. Hal ini dibuktikan melalui uji F yang memperoleh nilai F hitung sebesar 16,807 dengan tingkat signifikansi 0,001 lebih kecil dari 0,05. Temuan ini menunjukkan bahwa bantuan pemerintah dan pajak daerah secara bersama-sama memiliki peran dalam memengaruhi pendapatan pelaku IKM konvensional tenun.
2. Secara parsial, variabel bantuan pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan IKM konvensional tenun di Kota Larantuka. Hasil uji t menunjukkan nilai t hitung sebesar 4,434 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik bantuan yang diberikan pemerintah dalam bentuk modal, pelatihan, pendampingan, fasilitas produksi, dan dukungan pemasaran, maka semakin meningkat pula pendapatan yang diperoleh pelaku IKM konvensional tenun.
3. Secara parsial, variabel pajak daerah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pendapatan IKM konvensional tenun di Kota Larantuka. Hasil uji t menunjukkan nilai t hitung sebesar 0,704 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,486 yang lebih besar dari 0,05. Temuan ini menunjukkan bahwa pajak daerah belum menjadi faktor utama yang memengaruhi perubahan pendapatan pelaku IKM tenun. Pendapatan usaha lebih banyak dipengaruhi oleh faktor lain seperti bantuan pemerintah, kapasitas produksi, kualitas produk, dan akses pemasaran.

#### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur, khususnya instansi yang membina sektor UMKM dan industri tenun, disarankan untuk terus meningkatkan program bantuan pemerintah berupa bantuan modal, pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, serta dukungan pemasaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan pemerintah memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan IKM konvensional tenun sehingga program tersebut perlu dilakukan secara berkelanjutan dan tepat sasaran.
2. Terkait pajak daerah, pemerintah daerah perlu memberikan sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif kepada pelaku IKM tenun mengenai manfaat pajak daerah bagi pembangunan dan pengembangan usaha. Selain itu, kemudahan administrasi perpajakan juga perlu terus ditingkatkan agar pelaku usaha tidak menganggap pajak sebagai beban yang dapat menghambat perkembangan usahanya.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain yang diduga memengaruhi pendapatan IKM konvensional tenun, seperti akses permodalan, kualitas produk, inovasi produk, teknologi produksi, strategi pemasaran, dan akses pasar. Penelitian berikutnya juga dapat memperluas jumlah responden dan wilayah penelitian agar hasil yang diperoleh lebih

representatif dan mampu menggambarkan kondisi IKM tenun secara lebih komprehensif.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amelia, & Sicillia. (2025). *Pengaruh kebijakan perpajakan terhadap kondisi usaha mikro kecil dan menengah*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 12(1).
- Anwar, S., & Hidayat, R. (2021). Pengaruh bantuan modal dan program pemberdayaan terhadap peningkatan pendapatan pelaku usaha mikro kecil dan menengah. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(1), 45–58.
- Handayani, T., & Saputra, A. (2023). Analisis dampak kebijakan pajak daerah terhadap keberlangsungan dan profitabilitas industri kecil menengah. *Jurnal Pajak dan Keuangan Daerah*, 5(2), 89–102.
- Jati, & Bala. (2019). Program pemberdayaan pemerintah pada pengrajin tenun ikat Lamaholot dalam meningkatkan pendapatan. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 17(2).
- Karmeli, et al. (2022). Analisis dampak bantuan pemerintah terhadap pendapatan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 28(3).
- Kusuma, W., & Wardani, D. K. (2020). Peran insentif pemerintah dan pelatihan manajemen usaha dalam memicu produktivitas pengrajin kain tenun tradisional. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 22(2), 130–141.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Prasetyo, P. E. (2019). Peran sektor industri kecil dan menengah (IKM) dalam penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 12(2), 115–126.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Sari, N. M., & Wiguna, I. G. (2022). Faktor-faktor yang memengaruhi pendapatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sektor kerajinan tangan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 17(1), 74–85.
- Wulandari, et al. (2024). Pengaruh variabel perpajakan terhadap kinerja dan keberlangsungan pelaku usaha kecil dan menengah. *Jurnal Riset Manajemen*, 9(4).